

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Dengan terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan yang ada di pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta bangsa Indonesia. Masalah pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian umum bagi para pengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Oleh sebab itu pemerintah harus memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan.

Disebabkan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintah dilingkungan sector public juga semakin meningkat. Prnggunaan akuntansi selama ini hanya diterapkan secara utuh pada organisasi sector swasta dalam pembuatan laporan keuangan mereka. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur pemerintah yang belum begitu memahami arti penting dari akuntansi pemerintah, baik dari segi ilmu

maupun dari segi praktek, sehingga aparaturnya pemerintah sering terkendala pada saat penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan laporan pertanggungjawaban pihak atau staf bagian keuangan pada suatu pemerintahan dan laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Karena laporan tersebut merupakan gambaran keuangan berupa transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu entitas. Laporan keuangan juga keputusan, begitu juga bagi pihak luar pemerintah seperti perusahaan, bank, investor, maupun calon investor. Adapun beberapa laporan keuangan pemerintah terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus kas, Catatan Atas Laporan Keuangan

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku pada saat ini di negara kita, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Ghalia Indonesia,2018)

Dalam mewujudkan tujuan reformasi tersebut, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain diterapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan

dalam memobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Perubahan tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut berisi mengintruksikan kepada Pemerintah daerah segenap unturnya untuk segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan (Ibid).

Kemudian Menteri Dalam Negeri menyempurnakan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 yang memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dimana sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas yang selanjutnya dimodifikasi mengarah kepada basis akrual (*accrual basic*), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP), diatur dalam Peraturan pemerinah No. 25 Tahun 2004 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian penerapan SAKD diharapkan mampu menghasilkan catatan dan laporan

atas transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi/instansi pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat, dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Adapun karakteristik laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang (SAP) adalah sebagai berikut : Relevan , Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami.

Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan disisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan untuk menutupi seluruh biaya tersebut, juga berusaha untuk mencegah dan menghindari pemborosan dari hal-hal yang dianggap merugikan karena hal tersebut akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan instansi pemerintah tersebut. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk kegiatan keuangan.

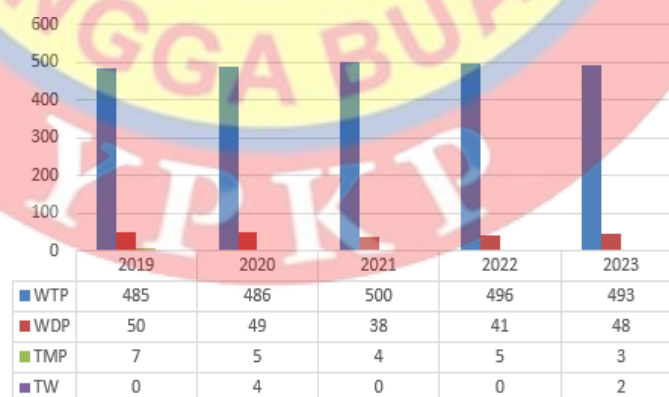
Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah Sistem pengendalian Intern. Sistem pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2008 tentang SPIP. Sistem pengendalian Intern memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kendalan laporan keuangan. Sehingga

penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Hal ini Senada dengan penelitian Anggraeni (2014) dan I Putu Upabayu (2014) yang memperoleh hasil sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan pada kualitas informasi laporan keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar daerah telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih ada sejumlah daerah yang belum mencapai opini tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1.1

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data Olah, 2024

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD di Jawa Barat menunjukkan perkembangan kualitas laporan keuangan atas LKPD seperti yang

diharapkan. Opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Perkembangan opini LKPD tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.2
Opini LKPD TA 2019-2023

Rincian perkembangan opini BPK atas LKPD di Provinsi Jawa Barat

Entitas	Tahun Opini LKPD				
	2019	2020	2021	2022	2023
Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bandung Barat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
Kab. Bogor	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Cianjur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Indramayu	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Entitas	Tahun Opini LKPD				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Subang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Bandung	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Bekasi	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : IHPS I tahun 2020-2024

(Keterangan : WTP= Wajar Tanpa Pengecualian, WDP = Wajar Dengan

Pengecualian, TW = Tidak Wajar TMP = Tidak memberikan Pendapat).

Tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa LKPD Kabupaten Bandung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama rentang periode 2021-2023. Hal ini memotivasi untuk dilakukannya penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa faktor tersebut adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Kantor kecamatan merupakan instansi pemerintah yang merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu Pendidikan, mutu kesehatan dan lain-lain.

Kantor Camat Pacet didirikan pada tahun 1980 yang beralamat di Jl. Raya Majalaya-Pacet No.01 Cipeujeuh Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Hingga saat ini jumlah karyawan yang bekerja di kantor Kecamatan berjumlah 27 orang yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kasi Trantib dan staf-staf lainnya. Kantor Camat Pacet dalam pengelolaan dana APBD telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari dokumen, pencatatan dan menghasilkan laporan keuangan. Metode sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan selama ini adalah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan basis akrual sebagai bahan pembuatan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang diberi judul *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Pacet Kabupaten Bandung*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba mengidentifikasikan masalah yang menjadi fenomena pada kualitas laporan Keuangan yaitu kualitas laporan keuangan, khususnya yang disajikan dalam LKPD belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan SAP.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
Bagaimana peran Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Pacet Kabupaten Bandung.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi mengenai masalah yang diteliti yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Ekonomi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah Bagaimana peran Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Pacet Kabupaten Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Pacet Kabupaten Bandung.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran lebih jelas mengenai Analisis Penerapan Sistem

Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Pacet Kabupaten Bandung.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Landasan Teori

Menurut Romney & Stainbart (2018:10) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, control internal serta langkah-langkah keamanan.

Menurut Turner, Weickgennant, & Copeland (2017:4) sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi serta terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian.

Menurut Mursydi (2013) laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui posisi kinerja keuangan suatu entitas dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk periode atau pada saat tertentu.

Sistem informasi akuntansi merupakan acuan baik tidaknya sebuah laporan keuangan, adapun paparan laporan keuangan Menurut Kasmir dalam (Winarno, 2017) menyimpulkan bahwa, "Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu".

Kualitas Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat Dipahami.

1.6.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan ini peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai pendukung dan acuan bagi penelitian ini.

Hasil penelitian sebelumnya dijelaskan dibawah ini :

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Indana Zulfah (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kab.Aceh Utara	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas pelaporan keuangan di SKPD kab. Aceh Utara
2.	Fitri Ningsih (2013)	Analisis penerapan sistem akuntansi pemerintah pada kantor Camat Pendalihan IV Koto Kab. Rokan Hulu	Bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat pendalihan IV belum sesuai dengan PP No 24 tahun 2005 dan Peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006
3.	Vini Oksilia Tandayu, Meily	Analisis penerapan sistem	Menunjukan kualitas pelaporan di Kantor

	Y.B (2019)	Kalalo akuntansi pemerintah daerah apada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Bolaang Mongodow	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bolmong sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan.
--	---------------	--	--

Table 1.3 1

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian untuk mencari data dan informasi pada penelitian ini adalah Kantor Camat Pacet yang beralamat di Jl. Raya Majalaya-Pacet No.01 Cipeujeuh Kabupaten Bandung. Sedangkan waktu penelitian berlangsung pada bulan Maret 2025 sampai selesai.